



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI  
KE KABUPATEN GUNUNGGIDUL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021  
TANGGAL 12 – 16 DESEMBER 2020**

---

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI pada Masa Sidang II 2020-2021 memutuskan melalui Rapat Intern tanggal 9 November 2020, akan melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke 3 (tiga) provinsi, yaitu ke Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat dan Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta.

**A. Dasar Hukum**

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR-RI terhadap legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- b. UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
- c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang Fungsi, Wewenang, Dan Tugas DPR RI Pasal 59 ayat (4) tentang Tugas Komisi Di Bidang Pengawasan Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
- d. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi DPR-RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 9 November 2020 tentang rencana kunjungan kerja Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat dan Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta.
- f. Surat Tugas Pimpinan DPR RI No. PS.31/PS 10/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, untuk melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Gunungkidul D.I Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 12 s/d 16 Desember 2020.

**B. Maksud dan Tujuan**

Mendapatkan penjelasan dari pejabat daerah mengenai implementasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menggali dan menyerap aspirasi, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang

pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di daerah yang dikunjungi.

### C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 oleh Komisi X DPR-RI ke Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta adalah:

- |     |       |  |   |
|-----|-------|--|---|
| 1.  | A-444 | Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.                            | Wakil Ketua Komisi X<br>FPKS            |
| 2.  | A-185 | Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.                 | Wakil Ketua Komisi<br>X/FPDI Perjuangan |
| 3.  | A-539 | Dede Yusuf ME., ST., M. I.Pol.                         | Wk. Ketua Komisi<br>X/FPDemokrat        |
| 4.  | A-203 | My Esti Wijayati                                       | Anggota/FPDI<br>Perjuangan              |
| 5.  | A-215 | M. Guruh Sukarno Putra                                 | Anggota/FPDI<br>Perjuangan              |
| 6.  | A262  | Irine Yusiana Roba Putri, S. Sos., M.<br>Comm Mediast. | Anggota/FPDI<br>Perjuangan              |
| 7.  | A-301 | Dr. H.A. Mujib Rohmat, M.H.                            | Anggota/FPGolkar                        |
| 8.  | A-316 | H. Muhamad Nur Purnamasidi                             | Anggota/FPGolkar                        |
| 9.  | A-076 | Ir. Dwita Ria Gunadi                                   | Anggota/FPGerindra                      |
| 10. | A-088 | Ir. H. Nuroji  | Anggota/FPGerindra                      |
| 11. | A-399 | Eva Stevanny Rataba                                    | Anggota/FPNasdem                        |
| 12. | A-029 | Drs. H. Bisri Romly, MM.                               | Anggota/FPKB                            |
| 13. | A-039 | Muh. Hasanuddin Wahid                                  | Anggota/FPKB                            |
| 14. | A-548 | A.S. Sukawijaya Alias Yoyok Sukawi                     | Anggota/FPDemokrat                      |
| 15. | A-489 | Drh. Hj. Dewi Coryati, M. Si.                          | Anggota/FPAN                            |
| 16. | A-459 | Hj. Iliza Saaduddin Djamal, SE.                        | Anggota/FPFP                            |
| 17. | A-466 | Rojih  | Anggota/FPFP                            |

Dalam kunjungan kerja di dampingi dari mitra kerja yaitu:

- |    |                                   |  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D.    | Direktur Pembelajaran dan<br>Kemahasiswaan – Ditjen Dikti –<br>Kemendikbud RI                |
| 2. | Muhammad Neil El Himam            | Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk<br>Kreatif – Kemenparekraf RI                       |
| 3. | Edy Wardoyo                       | Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata<br>dan Penyelenggaraan Kegiatan –<br>Kemenparekraf RI |
| 4. | Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Si., DFM | Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda –<br>Kemenpora RI  |
| 5. | Dr. Raden Isnanta, M.Pd.          | Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga –<br>Kemenpora RI   |
| 6. | Purwanto                          | Staf Tata Usaha Sekretaris Kemenpora RI  |

7. Dr. Drs. Joko Santoso, M.Hum. Biro Perencanaan dan Keuangan – Perpusnas RI
8. Tubu P.B. Simanjuntak, S.E., M.M. Subkoordinator Pemantauan dan Evaluasi – Perpusnas RI

Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli serta Tim Pemberitaan Setjen DPR RI:

1.	Ahmad Mufarod, S.IP.	Kasubag. TU Setkom. X
2.	Sugiyanto, SE.	Sekretariat Komisi X
3.	Fathurahman	Sekretariat Komisi X
4.	Agom Herlani	Sekretariat Komisi X
5.	Dra. Henny Listyowati, M.Si.	Tenaga Ahli Komisi X
6.	Dr. Khalilah, M. Pd.	Tenaga Ahli Komisi X
7.	Tegar Azis	Bagian TV Parlemen
8.	Surahmat Eko Budi	Bagian Pemberitaan

#### D. Agenda Kunjungan Kerja

Pertemuan dengan Bupati Gunungkidul D.I. Yogyakarta, Hj. Badingah, S.Sos., yang dihadiri:

- a. Pimpinan DPRD Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntarningsih, S.E.
- b. Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Ir. Eddy Praptono, M.Si.
- c. Kepala Dinas Pariwisata, Ir. Asti Wijayanti, M.A.
- d. Kepala Dinas Kebudayaan, Agus Kamtono
- e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Drs. Ari Ridlo, M.M.
- f. Ketua Dewan Pendidikan, Andang Suhartanto
- g. Ketua Dewan Kebudayaan, CB Supriyanto
- h. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Sunyoto
- i. Ketua KNPI, Heri Santoso
- j. Ketua Pengurus PGRI, Bahron Rasyid

## II. TEMUAN DATA

### A. UMUM

Pencegahan penyebaran dan penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi fokus program dan kegiatan Pemda Kabupaten Gunungkidul. Data Covid-19 per 12 Desember 2020 yang disampaikan Bupati Gunungkidul, sebagai berikut:

- a. Jumlah Suspek: 1.942 orang
- b. Jumlah konfirmasi positif kumulatif: 554 orang
- c. Jumlah konfirmasi positif dalam perawatan: 126 orang
- d. Konfirmasi positif sembuh: 410 orang
- e. Konfirmasi positif meninggal: 18 orang

Pemda Kabupaten Gunungkidul melakukan *refocussing* anggaran untuk bidang kesehatan, ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial; dengan menggeser anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) ke belanja tak terduga (BTT) sebesar 210 miliar rupiah yang dialokasikan antara lain untuk:

a. Dinas Kesehatan	16.102.083.861,78
b. RSUD Wonosari	9.146.300.000,00
c. RSUD Saptosari	14.130.425.900,00
d. BPBD	2.809.238.800,00
e. Dinas Sosial	10.489.655.500,00

Pemda Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19. Pedoman ini ditindaklanjuti dengan sosialisasi, penyusunan SOP, penyiapan sarana prasarana yang memadai, dan dukungan dari semua pihak, baik forkompimda maupun elemen masyarakat.

## **B. BIDANG PENDIDIKAN**

### ***Identifikasi Data dan Informasi Dikdasmen***

- 1) Selama masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan berbagai kebijakan agar peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan sebagai berikut:
  - a. model pembelajaran tatap muka dihentikan total dan dilakukan secara daring dengan beberapa metode, yaitu *online* menggunakan jaringan internet, *online* menggunakan WA group, dan *online* menggunakan jaringan HT (*handy talky*), sesuai dengan daya dukung yang tersedia di sekolah masing-masing.
  - b. kegiatan pembelajaran dilakukan dengan kombinasi daring dan luring. Pembelajaran luring tetap dilakukan dengan pola belajar dari rumah (BDR) tetapi melalui tahap persiapan BDR. Persiapan BDR dilakukan dengan kegiatan pengambilan dan pengumpulan tugas oleh siswa dengan datang ke sekolah secara bergantian seminggu sekali atau dua kali, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan.
  - c. sedang menyusun Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah pada masa kebiasaan baru (*new normal*). Panduan tersebut masih dalam koordinasi dan pembahasan bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Gunungkidul beserta pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Panduan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 2) Untuk mengatasi keterbatasan SDM dan kondisi geografis Gunungkidul yang cukup luas dengan topografi bergunung-gunung; Pemda Kabupaten Gunungkidul telah membangun dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selama 3 (tiga) tahun terakhir. TIK diarahkan penggunaannya

untuk manajemen administrasi dan pembelajaran dilakukan dengan prioritas pemanfaatan dan optimalisasi implementasi manajemen berbasis TIK. Dengan kebijakan ini diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja dan mengatasi kendala kurangnya jumlah SDM, luasnya wilayah (Luas Kab. Gunungkidul adalah 46% luas Propinsi DIY), serta topografi Gunungkidul yang relatif sulit tersebut. Orientasi kegiatan berbasis TIK khususnya di bidang pendidikan, Kabupaten Gunungkidul telah meraih 2 penghargaan nasional, yaitu 1). *Ki Hajar Award* dari Kemdikbud untuk tahun 2018 dan 2019) dan 2). *Top IT Digital Award* dari Konsorsium Perusahaan IT Multinasional di Jakarta untuk tahun 2018, 2019 dan 2020.

- 3) Evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan Kemendikbud RI, sebagai berikut:
  - a. Program Indonesia Pintar (PIP)

Masih terdapat siswa yang belum terjangkau PIP, untuk itu alokasi anggaran PIP perlu ditingkatkan. Mekanisme penentuan sasaran dan pencairan PIP yang kurang serentak perlu ditata kembali sehingga tidak menimbulkan masalah dan kegaduhan di masyarakat.
  - b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
    - a) Keterlambatan terbitnya Permendikbud yang mengatur tentang Juknis BOS menjadi hambatan bagi daerah dan sekolah dalam mengelola dana BOS. Oleh sebab itu Juknis BOS diharapkan terbit di bulan Desember tahun sebelumnya, atau selambat-lambatnya bulan Januari tahun berjalan.
    - b) Kebijakan Merdeka Belajar perlu diikuti dengan kebijakan Merdeka Belanja Dana BOS, artinya dana BOS diharapkan bisa dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kepentingan sekolah sesuai kebutuhan dengan berbasis MBS, tidak perlu ada batasan-batasan umum yang membelenggu sekolah untuk berkembang dan maju.
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
    - a) Menu kegiatan perlu ditambah, karena khususnya Kabupaten Gunungkidul, DAK merupakan sumber dana yang menjadi skala prioritas dimana APBD sangat minim, disisi lain sarana prasarana Satuan Pendidikan perlu segera dibenahi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
    - b) Petunjuk teknis dan Petunjuk Operasional perlu terbit di awal tahun sehingga dapat segera dilaksanakan proses kegiatan fisiknya.
  - d. Kurikulum
    - a) Diperlukan Standar Nasional pencapaian kurikulum yang disesuaikan dengan masa pandemi Covid-19.
    - b) Pengembangan kurikulum perlu dibarengi dengan adanya kegiatan pengembangan kapasitas guru melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah pusat.
  - e. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

- a) Pedoman PPDB dari pusat diharapkan segera terbit misalnya pembagian kuota jalur zonasi, prestasi, kepindahan, dan anak kurang mampu. Persoalan lain batasan terbitnya Kartu Keluarga dalam jalur kepindahan segera perlu ditegaskan rentang waktunya.
- b) Perlu pendampingan sumber daya manusia dalam layanan sistem *online* melalui peningkatan kapasitas personel di daerah.
- f. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
  - a) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, utamanya terkait dengan program Pendidikan Inklusi sangat dibutuhkan perhatian, dorongan, dan fasilitas dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat diharapkan menerbitkan regulasi baru yang mampu memberikan perhatian, dorongan, dan fasilitas kepada daerah untuk mengimplementasikan Pendidikan Inklusi secara baik.
  - b) Perlu adanya organ kedinasan di daerah tingkat kabupaten/kota yang menangani masalah Pendidikan Inklusi secara jelas dan diatur dalam regulasi pemerintah.
- g. Pendidikan Vokasi
  - a) Saat ini pendidikan vokasi (SMK) yang secara kewenangan menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur c.q. Dinas Pendidikan Propinsi, akan tetapi keberadaannya secara geografis ada di wilayah kabupaten/kota, kadang menjadi permasalahan terkait dengan sinkronisasi berbagai hal. Untuk itu perlu adanya mekanisme koordinasi terkait permasalahan yang mungkin muncul, misalnya terkait mekanisme pendataan, kelanjutan sekolah, penyaluran bantuan hibah, hubungan lintas sektor, dll.
  - b) Perlu adanya penataan dan studi kelayakan yang sangat cermat dalam pendirian SMK dan pembukaan jurusan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan daya dukung lingkungan serta potensi penyerapan lulusan di dunia kerja.
- 4) Terhadap kebijakan Merdeka Belajar, Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul memberikan catatan sebagai berikut:
  - a. Ujian berstandar Nasional yang diserahkan ke sekolah perlu didampingi dengan penguatan kapasitas guru dan peningkatan integritas agar hasilnya bermutu.
  - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disederhanakan seharusnya dikawal oleh pengawas tanpa mengurangi substansi hak anak untuk memperoleh capaian kurikulum.
  - c. Dihilangkannya Ujian Nasional hendaknya daerah diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu daerah, produknya disamping untuk pemetaan mutu juga untuk kepentingan pemenuhan hak anak; anak berprestasi secara akademik mendapatkan haknya dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat jalur prestasi.
  - d. Terkait penerapan zonasi dalam PPDB, hendaknya pemerintah pusat secara dini menerbitkan regulasi sehingga pemerintah daerah segera

mengatur regulasi daerah yang akan disinkronkan dengan peraturan pusat. Keterlambatan regulasi pusat sering membawa persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam layanan PPDB terhadap masyarakat.

- 5) Untuk mempercepat keberhasilan membangun manusia Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan, maka diperlukan memperhatikan antara lain: (1) meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, (2) pendidikan berbasis teknologi, (3) memperbaiki kurikulum, (4) meningkatkan peran pemerintah daerah untuk mendorong, (5) membangun sekolah/lingkungan yang lebih baik, (6) memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan, dan (7) menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih.

### **Permasalahan dan Temuan Bidang Pendidikan**

- 1) Permasalahan utama bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul adalah:
  - a. Sarana prasarana yang tidak merata di satuan Pendidikan, misalnya peralatan multimedia pembelajaran dan akses jaringan internet.
  - b. Kurangnya rasio ketercukupan guru tetap (ASN/PNS) yang ada di sekolah (sebagai ilustrasi misalnya masih ada beberapa SD yang guru tetapnya (ASN/PNS) hanya 3 orang, sementara jumlah rombongan belajar ada 6 guru, dan masih banyak SD yang guru tetapnya (ASN/PNS) kurang dari 6 guru).
- 2) Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang telah ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah:
  - a. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dengan *sharing* pemanfaatan, misalnya laboratorium komputer di satu sekolah bisa digunakan oleh sekolah lain di sekitarnya dan membangun akses jaringan internet sekolah secara bertahap; di akhir tahun 2020 dan bertepatan dengan masa pandemi ini telah tersambung 49 titik jaringan internet sekolah dari Dinas Kominfo.
  - b. Mengotimalkan guru tetap (ASN/PNS) yang ada di sekolah, misalnya 1 guru mengajar rangkap 2 kelas (kelas 1 dan kelas 2) dan atau dengan mengangkat GTT.
  - c. Mengupayakan bantuan dana dari pihak lain, misalnya DAK dari pusat dan dana CSR dari perusahaan.
- 3) Untuk mengurangi kerumunan dan mobilisasi massa saat PPDB, kabupaten Gunungkidul melakukan PPDB secara online murni baik jenjang TK, SD, dan SMP. Berkas dokumen diakomodir untuk di-upload lewat aplikasi yang dikembangkan Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul. Regulasi dibuat berdasarkan Permendikbud kemudian diturunkan menjadi Perbub, Perkadis, dan Pedoman PPDB Kabupaten Gunungkidul. Secara umum pelaksanaan PPDB di Kabupaten Gunung Kidul berjalan lancar. Permasalahan PPDB adalah keterlambatan terbitnya Pedoman PPDB dari pusat. Harapannya Pedoman PPDB dari pusat lebih awal, sehingga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diatur di daerah segera bisa disesuaikan, misalnya terkait dengan pembagian kuota jalur zonasi, prestasi, kepindahan, dan anak kurang mampu.

- 4) Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh selama masa Pandemi COVID 19 ini dapat di implementasikan dengan baik di Kabupaten Gunung Kidul, namun masih ada kendala dan permasalahan antara lain sebagian siswa tidak mempunyai *handphone* android sendiri, masih ada daerah tempat tinggal siswa yang tidak terjangkau jaringan/sinyal seluler, dan sebagian orangtua siswa tidak melek teknologi informasi sehingga tidak bisa mendukung proses pembelajaran daring.

### **C. BIDANG KEBUDAYAAN**

Upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui program-program yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan di lapangan. Analisis mengacu pada data yang dihimpun oleh Dinas. Di antaranya adalah:

1. Data potensi kebudayaan (mengacu naskah PPKD)
2. Data Surat Keterangan Organisasi Kesenian
3. Data registrasi warisan budaya dan cagar budaya

Dari data tersebut kemudian disusun kegiatan teknis berbasis pelestarian yang terdiri dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

Selain penyusunan program berkonsep *take down*, Dinas juga mengakomodir masukan dan permohonan masyarakat (*take up*), tentunya tidak semua permohonan kegiatan diterima. Dinas memprioritaskan sejumlah usulan yang relevan dengan program-program yang telah disusun.

#### **Permasalahan dan Temuan Bidang Kebudayaan**

Permasalahan yang sering muncul terkait pemajuan kebudayaan adalah:

1. Belum tersajinya data yang lengkap dan valid terhadap objek pemajuan kebudayaan;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai objek pemajuan kebudayaan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pemajuan objek kebudayaan;
4. Kurangnya pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan;
5. Kurangnya *event-event* besar yang inovatif untuk mendukung pemajuan objek kebudayaan;
6. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pelestarian kebudayaan;
7. Belum adanya lembaga pendidikan yang konsen dalam bidang kebudayaan;
8. Kesenian khas Gunung Kidul seperti seni tari jelantur dan tayub serta seni musik rinding gumbeng belum mendapatkan perhatian sepenuhnya;
9. Belum memanfaatkan sejarah lokal Gunungkidul untuk memperkuat karakter wisata berbasis budaya;
- 10 Pemberdayaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal dan meningkatkan mutu kerajinan lokal Gunungkidul untuk mendukung pariwisata, belum mendapat perhatian sepenuhnya.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan budaya di Gunungkidul cukup terasa, terutama pada aspek pementasan seni. Dinas Kebudayaan sempat menghentikan sejumlah pementasan, namun setelah Pemda memperbolehkan kegiatan kembali



berjalan, Dinas Kebudayaan kembali menggelar kegiatan pentas seni berbasis daring dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

#### **D. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

1. Kondisi pariwisata dan ekraf di Kabupaten Gunungkidul saat pandemi mengalami stagnasi, kecuali untuk ekraf sub sektor kuliner. Ketika mulai memasuki *new normal* kondisi pariwisata perlahan mulai berangsur membaik dengan diijinkannya destinasi menerima kunjungan wisatawan dan usaha jasa pariwisata (UJP) mulai diijinkan operasional secara terbatas. Pembukaan dan ijin ini diberikan setelah pengelola menerima sosialisasi dan bersedia menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Selain menerapkan protokol Covid-19 juga harus mematuhi aturan lain yaitu: kunjungan hanya 50% dari kapasitas yang ada, wisatawan/tamu harus didata dan setiap hari Senin tidak menerima tamu/kunjungan kecuali bertepatan dengan hari libur. Sedangkan sektor ekraf memasuki *new normal* yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik daripada yang lain adalah sub sektor kuliner.
2. Upaya percepatan pemulihan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengambil langkah-langkah penting. Koordinasi ini antara lain melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), PHRI, HPI, PPJI, BPW, Forum Komunikasi Pokdawis, Forum Desa Wisata, OPD terkait, dan Pemerintah Propinsi DIY. Sebagai contoh koordinasi dalam menentukan penerima bantuan pelaku UJP terkena dampak Covid-19, sosialisasi, penerapan dan monitoring protokol Covid-19. Selain itu untuk menstimulasi kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian daerah, *stakeholder* tersebut di atas bersama dengan Dinas Pariwisata meluncurkan “Gerakan Bersama Wisata Guyub atau Gebyar Tayub”. Gerakan ini dimaksudkan untuk menjadi katalisator pergerakan perekonomian daerah melalui kunjungan wisata lokal Gunungkidul. Hal ini dikarenakan kunjungan wisatawan dari luar daerah yang masih belum optimal dan masyarakat Gunungkidul belum sepenuhnya mengenal destinasi wisata yang ada. Sasaran dari Gerakan ini adalah anak-anak sekolah, karyawan lembaga/instansi, kelompok masyarakat. Sebagai pengelolanya adalah para pelaku UJP yang ada di Gunungkidul.
3. Ekosistem ekonomi kreatif (Ekraf) di Gunungkidul sebelum pandemi menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Beberapa diantaranya yang menunjukkan pertumbuhan lebih dari yang lainnya adalah, seni kriya, fashion, kuliner, film, musik, dan seni pertunjukan. Dengan adanya pandemic, sektor ini terpaksa harus “istirahat” dahulu kecuali sub sektor fashion dan kuliner. Demikian juga saat *new normal* kondisi ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
4. Penyelenggaraan pendidikan pariwisata yang dimaksud di sini adalah pendidikan dan latihan bagi pelaku UJP. Selama pandemi kegiatan pendidikan hampir terhenti, tetapi pada saat *new normal* beberapa kegiatan pendidikan peningkatan kemampuan UJP mulai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga-

lembaga terkait, pemerintah provinsi DIY maupun dari Kemenparekraf, sedangkan yang dari Pemda tidak ada karena anggaran di-*refocussing* untuk penanganan Covid-19.

Kendala yang dihadapi adalah selain anggaran, jika pendidikan dilakukan secara *online/daring*:

- a. tidak semua lokasi jaringan internet stabil;
  - b. kurang fokus karena peserta ada di rumah gangguan urusan rumah tangga selalu saja ada;
  - c. harus membeli kuota internet.
5. Dukungan pemerintah daerah terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam kepariwisataan pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan melalui penyediaan dan pemeliharaan aksesibilitas, afinitas, atraksi dan promosi. Meskipun tidak terlalu besar anggaran yang dialokasikan untuk keempat hal tersebut tetapi diupayakan untuk selalu lebih baik. Untuk tahun 2019 masih bisa dilaksanakan tetapi di tahun 2020 kegiatan-kegiatan berkurang banyak, jikapun ada kegiatan, kegiatan diarahkan untuk mendukung pencegahan covid -19. Sebagai gambaran pada tahun 2020 anggaran di Dinas Pariwisata sekitar Rp. 8 M sudah termasuk belanja pegawai dan belanja langsung, target PAD sebesar Rp. 13,9 M. Sedangkan anggaran tahun 2021 sejumlah 18.840.510.953 dengan target PAD sebesar Rp 18 M. secara rinci dapat dilihat table berikut:

**Tabel: ANGGARAN DINAS PARIWISATA KAB. GUNUNGKIDUL DAN PAD TAHUN 2019, 2020, 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN		
		2019	2020	2021
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>27.918.128.500,00</b>	<b>13.972.171.120,00</b>	<b>18.000.100.000,00</b>
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	27.918.128.500,00	13.972.171.120,00	18.000.100.000,00
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>23.429.769.153,00</b>	<b>9.061.802.520,00</b>	<b>18.840.510.953,00</b>
2.	<b>Belanja Operasi</b>	<i>12.475.954.153,00</i>	<i>7.438.122.220,00</i>	<i>9.450.810.953,00</i>
2.1.	Belanja Pegawai	4.282.929.753,00	3.600.408.770,00	3.851.484.703,00
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.193.024.400,00	3.837.713.450,00	5.599.326.250,00
3.	<b>Belanja Modal</b>	10.953.815.000,00	1.623.680.300,00	9.389.700.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.429.769.153,00</b>	<b>9.061.802.520,00</b>	<b>18.840.510.953,00</b>

Sumber: Dinas Pariwisata,2020

6. Kinerja sektor pariwisata tahun 2015-2020 melalui penerimaan PAD (retribusi) dan jumlah kunjungan wisatawan sebagai berikut:

**Tabel: DATA PAD DAN PENGUNJUNG DESTINASI WISATA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2015-2020**

NO	TAHUN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		PENDAPATAN (Rp)	PENGUNJUNG (ORANG)	PENDAPATAN (Rp)	PENGUNJUNG (ORANG)		
1	2015	17.495.365.500	2.116.850	20.980.945.431	2.642.759	119,92	
2	2016	23.156.381.500	2.904.382	24.247.748.425	2.992.897	104,71	
3	2017	25.667.728.750	3.184.286	26.929.198.233	3.258.013	104,91	Terjadi badai cempaka pada tgl 28 Nov 2017
4	2018	28.276.144.000	3.585.552	24.243.414.350	3.040.095	85,74	badai cempaka 2017 mempengaruhi kunjungan wisata ke Kab. GK s/d bulan April 2018, pada tgl. 25 Juli 2018 terjadi gelombang besar yang memporak porandakan pantai selatan Kab. GK, tgl 22 Desember 2018 terjadi Tsunami di Selat Sunda
5	2019	27.918.128.500	3.845.033	25.089.479.405	3.267.497	89,87	tahun 2019 sering terjadi gelombang tinggi
6	2020	13.972.171.120	1.811.316	12.907.455.750	1.669.957	92,38	(Realisasi s/d tanggal 11 des 2020), Destinasi Wisata tutup karena pandemi covid-19 sejak 28 Maret 2020 ujicoba di 4 Destinasi pada akhir bulan Juni 2020, dan secara bertahap melakukan ujicoba pembukaan Destinasi dengan Protokol Kesehatan

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Gk, 2020

Sedangkan untuk lama tinggal wisatawan (LoS) masih relatif kecil dan belanja wisatawan masih cukup kecil. Pada tahun 2019 untuk Los baru mencapai 1,48 hari dan belanja wisatawan Rp 150.484,00. Sedangkan pada bulan opember 2020 LoS menurun menjadi 1,2 hari dan belanja wisatawan Rp 80.496,00.

7. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kepariwisataan di Gunungkidul:
  - a. Jalan menuju destinasi masih banyak yang belum memadai dibanding jumlah kunjungan wisatawan;
  - b. Lampu penerangan jalan menuju destinasi belum memadai sehingga aktivitas wisata di malam hari belum berkembang;
  - c. Akses internet belum stabil untuk semua destinasi;
  - d. Sarana dan prasarana yang ada di destinasi sebagian besar masih merupakan sarana prasarana dasar, belum ada hotel restoran yang representatif sehingga belum bisa menyelenggarakan event-event / MICE dengan skala yang lebih besar;
  - e. masih mengandalkan daya tarik alam, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah atau investor;
  - f. dukungan kualitas SDM masih sangat perlu ditingkatkan;
  - g. dukungan promosi masih perlu ditingkatkan.
8. Masukan dan usulan terhadap substansi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata: tambahan pasal yang mengatur tentang desa wisata.
9. Pandangan terhadap nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI: Jika dilihat dari sisi keterkaitan sektor pariwisata dan ekraf seharusnya akan lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian nasional karena sektor pariwisata dan ekraf merupakan sektor yang berbasis kepada kreatifitas. Berwisata tidak hanya melihat keindahan alam saja tetapi akan semakin menarik jika dipadukan dengan kreatifitas misalnya didukung dengan adanya fotografi, seni musik, seni pertunjukan, kuliner, fashion media promosi dll.  
Tetapi jika dilihat rentang kendali dalam pelaksanaan dilapangan akan menjadi lebih luas sehingga jika tidak didukung oleh personil yang kompeten maka akan sulit mencapai tujuan.
10. Sampai saat ini khususnya Dinas Pariwisata belum secara khusus melakukan pendataan pelaku usaha ekonomi kreatif, data yang ada merupakan data yang pernah mengikuti pelatihan ekraf, secara tupoksi sub sektor ekraf tersebar di berbagai OPD antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan.

#### **E. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- 1) Pada awal pandemi, semua aktivitas pemuda dan olahraga yang berpotensi terjadi pengumpulan masa (kerumunan) dihentikan sedangkan kegiatan yang memungkinkan dilakukan secara daring tetap dilakukan secara daring, misalnya dengan *video conference* (vicon). Setelah memasuki masa kebiasaan baru (*new normal*), kegiatan pemuda dan olahraga mulai dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, utamanya untuk lomba cabang olahraga yang tidak kontak fisik, misalnya cabang atletik
- 2) Setelah Pemerintah mengeluarkan pranata baru (*new normal*), kegiatan kepemudaan berupa pertemuan-pertemuan maupun pelatihan-pelatihan kembali digelar baik melalui tatap muka maupun dengan webinar. Demikian juga terkait kegiatan keolahragaan, baik olahraga pendidikan, olahraga prestasi maupun

olahraga rekreasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai penyesuaian yang harus dilakukan, meskipun hasilnya tidak dapat maksimal.

- 3) Program kegiatan kepemudaan dari Kemenpora di Kabupaten Gunungkidul terbatas pada kegiatan yang bersifat partisipatif dan berjenjang (misalnya: seleksi Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia, pertukaran pemuda antar propinsi, Seleksi Paskibaraka, dsb) Kabupaten Gunungkidul senantiasa berpartisipasi aktif, sedangkan kegiatan yang bersumber dari anggaran Kemenpora selama ini masih sangat minim. Di akhir tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul melalui KNPI mendapatkan kegiatan berupa Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda, dan sudah selesai dilaksanakan, dengan melibatkan 26 OKP yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
- 4) Kegiatan keolahragaan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 dan 2019 mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan Galadesa dari Kemenpora, dalam pelaksanaannya kegiatan Galadesa yang merupakan ajang adu prestasi bagi para atlet perwakilan kecamatan yang berbasis dari desa ini mendapatkan sambutan yang antusias dari masyarakat, meskipun hanya 6 cabang olahraga yang dipertandingkan (Bola voli, Badminton, Sepak Takraw, Tenis Meja, Atletik dan Sepakbola) serta dapat pula menghasilkan bibit-bibit atlet berpotensi untuk dibina lebih lanjut.
- 5) Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selalu mengikutsertakan para atlet Gunungkidul dalam berbagai *event* kompetisi regional dan nasional. Beberapa prestasi atlet berhasil diraih pada ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA) DIY maupun kompetisi lainnya yang bersifat regional maupun nasional.
- 6) Olahraga Unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul adalah Cabang Atletik untuk nomor Jalan Cepat, lari jarak menengah, dan jarak jauh. Salah satu Atlet Jalan Cepat terbaik dari Kabupaten Gunungkidul adalah peraih medali perak pada PON tahun 2016 dan peringkat lima pada Sea Games tahun 2019.
- 7) Data sarpras olah raga yang dimiliki Kabupaten Gunung Kidul dalam 3 tahun terakhir:

Sarpras Keolahragaan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Stadion	1	1	1
GOR	2	2	2
Lapangan Voli Pasir	1	1	1
Lapangan Voli Pantai	1	1	1

- 8) Anggaran keolahragaan yang disalurkan melalui KONI Kabupaten dapat direalisasikan sesuai rencana dan tidak ada kendala dalam realisasinya. Indikator penganggaran pada tahun berjalan adalah berdasar pada capaian prestasi yang dihasilkan dan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Berikut data anggaran 3 tahun terakhir.

APBN			APBD		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
-	-	-	1.500.000.000	4.400.000.000	1.800.000.000

### Permasalahan dan Temuan Bidang Pemuda dan Olahraga

Permasalahan	Yang telah dilakukan	Yang akan dilakukan
<b>Kepemudaan</b>		
Belum tersusunnya <i>database</i> tentang potensi pemuda di Gunungkidul	Inisiasi terwujudnya <i>database</i> kepemudaan dengan melakukan inventarisasi potensi pemuda melalui OKP yang sudah terbentuk	Pembuatan <i>Database</i> Potensi Pemuda Gunungkidul sebagai dasar penyusunan Program dan kegiatan secara berkelanjutan
Belum adanya Regulasi berupa Perda tentang Kepemudaan sebagai Payung Hukum pengembangan potensi pemuda	Studi Orientasi ke Kabupaten yang telah memiliki Perda Kepemudaan	Inisiasi penyusunan Perda Kepemudaan melalui Disdikpora
Belum adanya Pusat Kegiatan Pemuda ( <i>Youth Centre</i> ) sebagai tempat bermusyawarah, berekspresi, dan mengembangkan potensi bagi pemuda	Bersama Bappeda menginisiasi terbangunnya <i>Youth Centre</i> dan telah tersusun Kajian akhirnya	Mengusulkan terbangunnya <i>Youth Centre</i>
<b>Keolahragaan</b>		
Belum adanya <i>database</i> Potensi Olahraga di Gunungkidul	Inisiasi terwujudnya <i>database</i> potensi olahraga dengan melakukan inventarisasi potensi olahraga (sarpras, pelatih, atlet berprestasi) dengan melibatkan Pengkab yang sudah terdaftar di KONI	Pembuatan <i>Database</i> Potensi olahraga Gunungkidul sebagai dasar penyusunan Program dan kegiatan secara berkelanjutan
Belum adanya Regulasi berupa Perda tentang Keolahragaan sebagai Payung Hukum untuk pengembangan keolahragaan	Studi Orientasi ke Kabupaten yang telah memiliki Perda Keolahragaan	Inisiasi penyusunan Perda Keolahragaan melalui Disdikpora

Permasalahan	Yang telah dilakukan	Yang akan dilakukan
Belum adanya Pusat Kegiatan Olahraga yang memenuhi standar ( <i>Sport Centre</i> ) sebagai Pusat Pengembangan dan pembinaan olahraga	Bersama Bappeda telah selesai menyusun <i>Master Plan Sport Center</i>	Mengusulkan terbangunnya <i>Sport Centre</i>

## F. BIDANG PERPUSTAKAAN

### *Identifikasi Data dan Informasi Bidang Perpustakaan*

- 1) Kegiatan layanan perpustakaan selama masa pandemi dihentikan mulai bulan Maret minggu keempat sampai tanggal 26 Agustus 2020, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan daerah.
- 2) Kabupaten Gunungkidul mulai membuka layanan kembali mulai tanggal 27 Agustus 2020 dengan layanan sesuai protokol kesehatan COVID-19, didukung dengan layanan e-pusdagunungkidul atau perpustakaan digital yang memanfaatkan koleksi digital untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Beberapa layanan lainnya belum dapat dilaksanakan, yaitu:
  - a. layanan perpustakaan keliling belum dapat dilakukan sampai akhir Desember tahun 2020 karena siswa sekolah terutama SD dan SMP masih belajar secara daring atau belajar dari rumah.
  - b. layanan MIBARA atau “Minggu Baca Rame-Rame” yaitu membuka lapak Layanan Perpustakaan Keliling di area *carfreeday* juga belum dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi yang belum kondusif terkait pandemi COVID-19.
- 3) Perpustakaan Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dalam kegiatan sosialisasi dan pembudayaan perilaku protokol kesehatan *new normal* melalui kegiatan sosialisasi perilaku hidup bersih bagi pemustaka yang akan memasuki ruang perpustakaan untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dengan pemustaka yang lain, serta pembatasan jumlah dan waktu kunjung, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya hidup bersih dan sehat.
- 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan evaluasi dan capaian kinerja sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan khususnya dalam hal jumlah koleksi perpustakaan untuk LPPD tahun 2019 masih tergolong rendah yakni 37,66% (Jumlah koleksi judul buku dibagi jumlah koleksi buku seluruhnya,  $13.748/36.501 \times 100\%$ ).
  - b. capaian kinerja masih tergolong rendah karena kondisi ideal berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, untuk perpustakaan umum tingkat kabupaten, jumlah judul yang harus dimiliki adalah 0,025 per kapita (jumlah penduduk dikalikan 0,025), dengan ketentuan untuk penambahan koleksi

- terbaru yang terbit 5 tahun terakhir sekurang-kurangnya 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.
- c. Merunut data jumlah penduduk Gunungkidul versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah 768.523, maka perhitungan jumlah judul ideal koleksi yang harus dimiliki adalah 0,025 dikalikan jumlah penduduk Gunungkidul diperoleh hasil 19.213 judul buku. Jika dibandingkan dengan kondisi riil jumlah koleksi buku per 30 November 2020 di DISPUSSIP Kabupaten Gunungkidul sejumlah 14.496 judul dan 37.733 eksemplar, maka jumlah judul koleksi buku tersebut masih kurang sekitar 4.717 judul dari kondisi ideal berdasarkan SNP-nya.
  - d. terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan khususnya dalam hal naskah kuno, masih belum terinventarisasi dan terkelola secara baik karena belum terakomodir dalam rencana kerja (Renja) dan anggaran di Perpustakaan Kabupaten.
  - e. dalam hal koleksi Deposit, di Perpustakaan Daerah Gunungkidul sudah memiliki koleksi deposit (koleksi lokal/kekhasan koleksi) yang terdiri dari koleksi buku-buku laporan statistik, penelitian, buku cerita rakyat, maupun buku ensiklopedi tentang Gunungkidul, namun jumlah koleksi deposit belum cukup banyak. Sehingga masih perlu pengembangan dan pengelolaan yang berkelanjutan, yaitu merealisasikan Renja bidang perpustakaan dengan menyediakan anggaran yang cukup. Kondisi saat ini anggaran bidang perpustakaan pada Renja Pemkab Gunung Kidul sangat terbatas dan minimal.
- 5) Dinas Pendidikan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul mengupayakan peningkatan literasi dan minat baca masyarakat, melalui:
- a. pengembangan perpustakaan digital yang diberi nama e-pusdagunungkidul, dirintis dan diluncurkan pada Agustus 2017, dengan jumlah koleksi sampai dengan tahun 2020 ini mencapai 1.114 judul dan 1.959 *copy file*. Selama masa pandemi COVID-19, e-pusdagunungkidul sangat membantu masyarakat yang tetap ingin mengakses informasi tanpa harus datang ke Perpustakaan Daerah, karena di manapun dan kapanpun, e-pusdagunungkidul dapat diakses sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet.
  - b. Selama masa pandemi COVID-19, e-pusdagunungkidul sangat membantu masyarakat yang tetap ingin mengakses informasi tanpa harus datang ke Perpustakaan Daerah, karena di manapun dan kapanpun, e-pusdagunungkidul dapat diakses sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet.
  - c. penambahan koleksi perpustakaan digital Gunungkidul memperoleh tambahan anggaran meski jumlahnya belum optimal namun rutin di-*update* dan dikembangkan koleksinya setiap tahun.
- 6) Upaya peningkatan layanan dan membuat program inovasi perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungdul secara rutin setiap semester melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), maupun survei kebutuhan pemustaka dan survei kebutuhan koleksi.



Beberapa kegiatan yang merupakan program inovasi Perpustakaan Gunungkidul adalah:

- a. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang sudah dirintis sejak 2012 (saat itu bernama Program PerpuSeru, bekerjasama dengan Coca Cola Foundation Indonesia), sampai saat ini Perpustakaan Gunungkidul merupakan lembaga perpustakaan kabupaten yang eksis dalam Program PerpuSeru, yang pada tahun 2018 kemudian dialihkan dan dilanjutkan sebagai Program Nasional PNRI.
- b. Program layanan otomasi perpustakaan melalui aplikasi IBRA sejak 2012 (yang memudahkan dan efisiensi pada layanan pendaftaran anggota perpustakaan, layanan, peminjaman dan pengembalian buku, serta memudahkan penyajian laporan pengunjung, laporan anggota, dll), penyajian katalog online atau OPAC (*Online Public Access Catalogue*) di website DPK yang memudahkan masyarakat untuk memilih buku sebelum datang ke DPK, menyediakan komunikasi melalui media sosial seperti Website, Twitter, Instagram, Facebook.
- c. Perpustakaan digital e-pusdagunungkidul, dirintis tahun 2017 sampai sekarang setiap tahun dianggarkan untuk penambahan koleksi judulnya, meski dengan kemampuan APBD yang terbatas.
- d. Gerakan Sedekah Buku "SAJISAKA" (SATU JIWA SATU PUSTAKA), tahun 2020, yang merupakan pengembangan dan modifikasi kegiatan hibah buku tahun-tahun sebelumnya, dengan menggalakkan aksi sedekah buku serta mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat baik perorangan maupun lembaga.

### ***Permasalahan dan Temuan Bidang Perpustakaan***

- 1) Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di antaranya sebagai berikut:
  - a. Ketersediaan koleksi judul yang masih kurang dari kondisi idealnya (berdasarkan juga hasil evaluasi capaian LPPD)
  - b. Gedung perpustakaan yang ditempati saat ini kurang representatif untuk layanan publik dan sudah tidak memungkinkan untuk eksplorasi dan pengembangan kegiatan, pengembangan layanan, pengembangan koleksi, maupun pengembangan fasilitas untuk kegiatan publik (sudah diakomodir dengan rencana gedung baru 2021 dana DAK)
  - c. Sarana prasarana sangat minimal dan terbatas, khususnya terkait dengan sarana alih media dan preservasi kegiatan pelestarian koleksi, disamping sarana prasarana rak buku, tempat duduk pemustaka, meja baca, *display* buku baru, *display*/rak-rak deposit, rak-rak hasil penyiangan koleksi, sehingga untuk pengembangan kegiatan pelestarian/preservasi koleksi belum maksimal karena tidak didukung sarana prasarana yang memadai.
  - d. Dukungan anggaran untuk pelestarian dan inventarisasi naskah kuno belum pernah terakomodir dalam RENJA dikarenakan untuk kebutuhan yang

prioritas koleksi pun belum optimal, sehingga capaian evaluasi LPPD nya pun belum bisa memenuhi harapan.

- e. Di pedesaan, pembangunan fisik seperti jalan, gedung dan lain-lain masih menjadi prioritas dibanding dengan pembangunan SDM/pengembangan perpustakaan sehingga keberadaan 148 perpustakaan desa di 144 desa se-Gunungkidul sebagian besar masih perlu dukungan alokasi anggaran untuk pengembangan dan keberlanjutannya, karena usulan alokasi untuk pengembangan perpustakaan sering tidak muncul saat MUSRENBANG di tingkat desa/kecamatan.
  - f. Masih kesulitan membangun budaya baca di masyarakat karena budaya tutur masih lebih dominan dibanding budaya baca, dan pembiasaan baca sejak dini oleh karenanya perlu digalakkan dengan cara mengajak masyarakat khususnya anak-anak usia dini untuk mengunjungi perpustakaan. Dalam hal ini, fasilitasi armada untuk antar jemput yang sangat dibutuhkan oleh Perpustakaan Daerah untuk layanan antar jemput belum maksimal karena keterbatasan APBD.
  - g. Dampak negatif Pandemi COVID-19 juga pada pembatasan pendampingan dan pembinaan ke perpustakaan sekolah/madrasah/desa yang akan menghadapi akreditasi, perpustakaan desa yang akan menghadapi lomba dan kurangnya *monitoring* dan evaluasi perpustakaan desa dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- 2) Untuk atasi permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan telah dilakukan upaya sebagai berikut:
- a. Mengajukan anggaran penambahan koleksi judul baik melalui APBD Gunungkidul secara rutin per tahun maupun DAK PNRI.
  - b. Karena keterbatasan ruangan untuk layanan perpustakaan maka dilakukan penataan ruangan dengan memperhatikan berbagai aspek kenyamanan untuk pemustaka, dan menata ruangan dengan konsep yang minimalis, dengan sedikit ruangan tetapi kaya fungsi dengan pengaturan yang baik dan nyaman untuk pemustaka, untuk lantai bawah untuk ruang sirkulasi layanan, ruang anak, ruang internet, ruang pengolahan dan ruang baca, untuk *home theatre* di lantai 2 yang juga difungsikan untuk ruang rapat. Di samping itu mengajukan dana DAK PNRI dan kebutuhan untuk gedung perpustakaan sudah diakomodir dengan rencana gedung baru 2021 dari sumber DAK Pusat.
  - c. Sudah mengajukan untuk anggaran Sarpras pada DAK 2020, namun kemudian ditunda karena sudah memperoleh DAK gedung. Tahun 2022 akan mengajukan lagi untuk dukungan DAK khususnya untuk Sarpras preservasi kegiatan pelestarian koleksi.
  - d. Mengkomunikasikan ke BAPPEDA Gunungkidul, supaya kewenangan Perpustakaan Kabupaten terkait pengelolaan dan inventarisasi naskah kuno dapat diakomodir di RENJA 2022 sehingga dapat mulai dialokasikan anggarannya pada pra RKA tahun 2022.

- e. Sudah dilaksanakan *Roadshow* minat baca, termasuk disusunnya Peraturan Bupati tentang “Pojoyok Baca”, dibentuknya Pengurus Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) di 18 kecamatan, dan terus diupayakan sosialisasi, promosi dan publikasi program kegiatan perpustakaan maupun promosi minat baca, serta sosialisasi tentang pentingnya membaca di masyarakat.
- f. Mengupayakan kunjungan pemustaka kecil dengan Layanan Antar Jemput Kunjungi Perpustakaan guna pembiasaan minat baca sejak dini, namun masih terkendala jumlah maupun kondisi armada yang terbatas. Dan dilaksanakan pula berbagai kegiatan seminar, bedah buku dan kegiatan pameran sehingga masyarakat dapat mengenal perpustakaan secara lebih dekat sehingga dapat meningkatkan minat dan budaya baca di kalangan masyarakat umum dan siswa sekolah. Selain itu juga mengadakan lomba-lomba literasi untuk memasyarakatkan minat baca, melibatkan organisasi bidang perpustakaan/komunitas literasi untuk mendukung kegiatan yang ada di perpustakaan daerah, mengadakan Replikasi Perpustakaan Desa dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- g. Solusi permasalahan kegiatan pendampingan dan pembinaan adalah dengan melaksanakan secara virtual dengan, yaitu dibentuk tim pendamping, terjadwal dan dipantau perkembangan hasil pendampingannya. Hasil pendampingan tahun ini sebagai berikut:
  - a) Perpustakaan desa Balai Pintar di desa Pengkol Kecamatan Nglipa mendapat juara III tingkat Nasional tahun 2020;
  - b) Sebanyak 20 (dua puluh) perpustakaan sekolah/ madrasah/ desa di Tahun 2020 telah terakreditasi dengan hasil 17 (tujuh belas) mendapat nilai A, 2 (dua) mendapat nilai B, 1 (satu) mendapat nilai.

### III. PEMBAHASAN

#### A. BIDANG PENDIDIKAN

##### Masukan dan Pandangan Pemkab Gunungkidul

- 1) Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos. menyampaikan pandangan dan masukan terhadap program dan kegiatan bidang pendidikan, yaitu:
  - a. Program BOS, peruntukannya agar lebih luwes sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan, sesuai dengan semangat Merdeka Belajar perlu diikuti Merdeka Belanja.
  - b. Program DAK, mekanisme pengusulannya agar lebih disederhanakan.
  - c. Program LPDP, alokasi sasaran agar ditambah untuk guru.
- 2) Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga – Ir. Eddy Praptono, M.Si. memberikan masukan terhadap konsep Peta Jalan Pendidikan, sebagai berikut:
  - a. Kemendikbud perlu membuat dasar hukum yang jelas.
  - b. melakukan sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan terkait secara lebih terprogram.

- c. perlunya konsistensi kebijakan secara jangka panjang dan teknokratis sehingga kebijakan tidak mudah terputus di tengah jalan dan tidak terkesan seperti yang selama ini diasumsikan setiap ganti menteri ganti kebijakan.
  - d. pemenuhan jumlah pendidik yang masih kekurangan di satuan pendidikan perlu segera dicukupi.
  - e. penguatan kapasitas pendidik perlu melibatkan organisasi profesi.
  - f. peta jalan pendidikan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
  - g. peta jalan pendidikan harus mempertimbangkan perbedaan/keragaman kemajuan yang telah terjadi antar wilayah di Indonesia.
  - h. peta jalan pendidikan harus lebih bagus dan lebih maju daripada negara-negara berkembang lain dan setidaknya menuju ke arah setara dengan negara maju.
- 3) Masukan terkait pemenuhan penuntasan wajib belajar selama masa pandemi, sebagai berikut:
- a. Pemerintah perlu segera memberikan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap dan menyeluruh, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.
  - b. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan vaksin Covid-19 bagi seluruh siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
  - c. Perlunya fleksibilitas implementasi penggunaan dana BOS agar mudah dalam penganggaran dan peng-SPJ-annya, utamanya terkait dengan kegiatan penanggulangan dampak Covid-19 di sekolah.
- 4) Program kuota internet gratis pada dasarnya sangat bagus dan memberi manfaat sangat besar untuk pelaksanaan pembelajaran daring, akan tetapi masih perlu dipertimbangkan dan ditinjau ulang terkait dengan alokasi pemaketannya. Alokasi pemaketan sebagian besar diperuntukkan untuk mengakses situs-situs pembelajaran khusus yang telah disediakan oleh pemerintah, akan tetapi siswa dan guru memerlukan alokasi paket kuota yang lebih banyak untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat interaktif, misalnya untuk *video conference* dan untuk *download*/mengirim tugas-tugas dari siswa ke guru dan sebaliknya.
- 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul memberikan masukan atas rencana Komisi X DPR RI bersama Pemerintah akan melakukan *revisi terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*, sebagai berikut :
- a. Revisi pasal 36 s/d pasal 38 tentang kurikulum harus semakin mempertegas dan memperkuat posisi muatan pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila dalam struktur kurikulum di semua jenjang pendidikan. Dua muatan ini merupakan jantung pendidikan Indonesia yang “ber-Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila Sila 1 dan Pembukaan UUD 1945.
  - b. Revisi struktur kurikulum harus memperhatikan kebutuhan peserta didik sebagai generasi masa depan dan perkembangan dunia global serta kecenderungan revolusi industri. Struktur kurikulum hasil revisi nantinya harus *ramping* sehingga tidak memperberat beban peserta didik, namun tetap

mampu memacu kualitas peserta didik dalam kemampuan berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif.

- c. Revisi pasal 39 s/d pasal 44 tentang pasal pendidik harus memuat klausul yang mendorong pendidik dan stakeholder terkait untuk melakukan akselerasi peningkatan kompetensi pendidik agar mampu merespon perubahan dengan cerdas.
- d. Revisi pasal tentang pendidik harus mendorong pendidik untuk menjadi inovator di dunia pendidikan.
- e. Pasal tentang kesejahteraan guru perlu mempertegas peningkatan kesejahteraan guru secara adil, baik terhadap guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Honorer di sekolah negeri/ swasta, dan atau jenis-jenis guru lainnya yang ikut berjuang mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga pendidikan.
- f. Revisi pasal 45 tentang penyediaan sarana prasarana pendidikan. Dalam pasal ini belum diatur tentang digitalisasi pendidikan dan sarana-prasarananya. Oleh karena itu, dalam revisi nanti, perlu ada penegasan tentang pentingnya digitalisasi pendidikan dan standar sarana prasaranya untuk setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan di masa yang akan datang akan sangat tergantung pada proses digitalisasi pendidikan dengan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh.
- g. Pasal 49 ayat 1 menjelaskan, “Dana pendidikan selain gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Namun dalam realitanya, anggaran 20% tersebut termasuk gaji guru, dosen dan pendidikan kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan di Kemendikbud hanya sekitar Rp 50 trilyun. Dana sebesar itu menjadi kurang berarti untuk program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
- h. Pasal 57 s/d pasal 59 menjelaskan tentang evaluasi pendidikan dilakukan sebagai pengendali mutu pendidikan nasional. Pasal-pasal tersebut sebenarnya sudah jelas, namun sebagaimana kita ketahui bersama, pasal tersebut kemudian ditafsirkan ke dalam peraturan pemerintah untuk melaksanakan Ujian Nasional (UN). Padahal dalam ketiga pasal tersebut tidak ada yang mengindikasikan ke arah kewajiban melaksanakan UN. Oleh karena itu, pasal 57-59 yang mengatur masalah evaluasi pendidikan ini harus direvisi agar lebih tegas, tidak multi tafsir, mampu memberi rasa keadilan dan mampu memotret mutu secara komprehensif.
- i. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana diatur pada pasal 32, ditambahkan pasal yang mengatur tentang Pendidikan Inklusi.

### **Penyampaian informasi program dan kegiatan bidang pendidikan untuk Kabupaten Gunungkidul**

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud RI - Prof.drh. Aris Junaidi, Ph.D. menyampaikan program pendidikan tinggi untuk Kabupaten Gunungkidul telah

dialokasikan dana *Matching Fund* sebesar 250 miliar dan *Competitive Fund* sebesar 550 miliar. Diharapkan Pemkab Gunungkidul segera bekerja sama dengan PTN dan PTS yang ada di DIY sekitar 350 perguruan tinggi; untuk merealisasikan anggaran tersebut. Selama ini Kabupaten Gunungkidul melakukan banyak bekerja sama dengan UGM dalam pembangunan eco-wisata dan kegiatan lainnya.

## **B. BIDANG KEBUDAYAAN**

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul – Drs. Agus Kamtono, M.M. menyampaikan masukan terkait dukungan Pemerintah terhadap program dan kegiatan pelaksanaan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dan mendorong upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai objek pemajuan kebudayaan.
- b. Membantu pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pemajuan objek kebudayaan.
- c. Kerjasama melalui *event-event* besar yang inovatif untuk mendukung pemajuan objek kebudayaan.
- d. Mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur tentang pelestarian kebudayaan
- e. Membangun lembaga pendidikan yang konsen dalam bidang kebudayaan.
- f. Membantu upaya revitalisasi kesenian khas Gunungkidul seperti seni tari jelantur dan tayub serta seni musik rinding gumbeng dalam rangka pengayaan dan penguatan budaya yang memiliki karakter khas Gunungkidul.
- g. Memfasilitasi masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal yang spesifik dan meningkatkan mutu kerajinan lokal Gunungkidul untuk mendukung pariwisata.

## **C. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

- 1) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul – Ir. Asti Wijayanti, M.A., menyampaikan pandangan dan masukan mengenai perihal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan kepariwisataan antara lain:
  - a. Membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk sektor pariwisata dan ekraf melalui pelatihan dan dukungan modal usaha termasuk pelatihan pemasaran dan penyelenggaraan *event* promosi;
  - b. Membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah untuk sektor pariwisata dan ekraf melalui kemitraan yang berkelanjutan;
  - c. Mendorong penggunaan produk lokal di hotel-hotel dan restoran berbintang termasuk ASN dan Pejabat Negara;
  - d. Membantu pengembangan dan penyediaan sarana prasarana pariwisata yang layak untuk wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri;
  - e. Membantu promosi pariwisata melalui gerakan “bangga berwisata di Indonesia”.
- 2) Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf RI, Muhammad Neil El Himam, menyampaikan antara lain:

- a. Program dan kegiatan pariwisata untuk tahun 2020 dan tahun selanjutnya lebih terfokus pada kualitas pariwisata dengan indikator CHSE (*cleanliness, health, safety, enviroment sustainability*). Setiap kegiatan pariwisata harus memenuhi standar CHSE. Pada tahun 2020, Kemenparekraf telah memberikan sertifikat CHSE kepada sekitar 6000an (hotel, rumah makan, tempat wisata, dan obyek wisata) Diharapkan tahun 2021 meningkat jumlahnya. Penilaian dan pemberian sertifikat CHSE diberikan secara gratis oleh Kemenparekraf.
  - b. DAK Bidang Pariwisata untuk Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan DAK Fisik sebesar 6.560.650.000 dan DAK Non-Fisik sebesar 862.578.000. Alokasi DAK tahun 2021 sebesar 7,4 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,6 miliar, berarti mengalami kenaikan sebesar 4,8 miliar.
  - c. Untuk melaksanakan UU No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Kemenkraf akan mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan ekosistem ekonomi kreatif yang menghasilkan produk kreatif berbasis kekayaan intelektual (IT) dan warisan budaya.
- 3) Terkait adanya kebijakan baru pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa perubahan orientasi pariwisata dari kuantitas menjadi kualitas tentunya akan berdampak pada perubahan indikator kepariwisataan. Selama ini indikator wisata antara lain adalah jumlah wisatawan dan lama kunjungan (*long of stay*). Untuk itu Kemenparekraf harus segera mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan indikator tersebut agar daerah dapat segera menyesuaikan.

#### **D. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- 3) KONIDA menyampaikan gelandang olahraga Handayani yang ada di Kabupaten Gunungkidul belum memiliki fasilitas olahraga (*sport center*) berstandar internasional, mengingat Gunungkidul banyak menghasilkan atlet cabang olahraga atletik, kebutuhan tersebut cukup mendesak.
- 4) Ketua KNPI Gunungkidul – Heri Santoso menyampaikan kebutuhan pusat-pusat kegiatan kepemudaan (*youth center*) dapat dibangun di Gunungkidul.
- 5) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, Dr. Raden Isnanta, M.Pd. menyampaikan:
  - a. alokasi dana dekonsentrasi untuk Provinsi DIY sebesar 2,3 miliar yang digunakan untuk mencari potensi atlet. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi atlet olahraga tenis yang saat ini sedang memasuki babak-babak final. Kabupaten Gunungkidul biasanya memiliki atlet unggulan untuk cabang atletik seperti jalan cepat dan lari.
  - b. Kemenpora dalam posisi menampung potensi atlet dari daerah di seluruh Indonesia untuk diarahkan menjadi atlet nasional. Terkait kegiatan pembibitan atlet sepakbola, Kabupaten Gunungkidul perlu diberikan apresiasi karena

merupakan satu-satunya kabupaten yang secara rutin menyelenggarakan LIGA Pelajar.

- c. Tahun 2021 fokus kegiatan Kemenpora pada olahraga wisata (*sport tourism*) Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu wisata utama DIY diharapkan segera bekerja sama dengan KONI dan FORMI untuk menyiapkan pusat-pusat unggulan turis yang dapat dijadikan potensi even olahraga wisata tingkat nasional maupun internasional.

## **E. BIDANG PERPUSTAKAAN**

### ***Masukan dan Pandangan Dinas Perpustakaan Pemkab Gunung Kidul***

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul – Drs. Ali Ridlo, M.M. menyampaikan pandangan dan masukan terkait dukungan Pemerintah terhadap pengembangan dan pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah sbb:

- 1) Dana Alokasi Khusus untuk Sarana Prasarana gedung layanan perpustakaan yang akan dibangun dari dana DAK 2021, mohon dapat di-*support* karena dengan keterbatasan APBD Gunungkidul, kecil kemungkinannya untuk memenuhi sarana prasarana pelayanan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan yang representatif, menarik, dan nyaman.
- 2) Penambahan untuk Koleksi buku, koleksi jurnal, koleksi Alat Peraga Edukasi (APE) *indoor* dan *outdoor* mohon dapat di-*support* juga dari anggaran pusat, khususnya dalam rangka memenuhi sarana prasarana gedung layanan perpustakaan yang baru jadi 2021 yang akan datang.
- 3) Alokasi anggaran untuk kegiatan inventarisasi dan pengelolaan naskah kuno selama ini belum dapat terakomodir dalam Rencana Kerja Dispusip Gunungkidul, sehingga untuk koleksi naskah kuno DISPUSSIP Gunungkidul belum melaksanakan inventarisasi dan pengelolaannya, padahal dalam LPPD itu menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk bidang perpustakaan.
- 4) Sarana prasarana untuk kegiatan pelestarian dan perawatan koleksi juga belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai baik untuk penyediaan sarana prasarannya maupun dukungan anggaran untuk alih mediana. Sehingga dengan demikian akan dapat mewujudkan perpustakaan daerah yang unggul dalam pelayanan, kenyamanan dan rujukan bahan koleksi yang lengkap dan menarik. Selain itu perlunya dukungan sarana prasarana IT dan pengembangan Perpustakaan Replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- 5) Anggaran untuk penambahan armada operasional perpustakaan, mengingat saat ini DISPUSSIP Gunungkidul memiliki sejumlah 4 unit mobil, namun 1 dalam kondisi tidak layak operasional. Sehingga masih dibutuhkan tambahan penyediaan mobil operasional dalam rangka peningkatan pelayanan perpustakaan khususnya pada Pelayanan Antar Jemput Kunjung Perpustakaan, Layanan Perpustakaan Keliling, dan Layanan Antar Pustaka Pinjam Kolektif



## **Penyampaian informasi program dan kegiatan bidang perpustakaan untuk Kabupaten Gunung Kidul**

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas RI, Dr.Drs. Joko Santoso M.Hum. menyampaikan bahwa kegiatan literasi di Kabupaten Gunungkidul berkembang sangat baik, terbukti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul meraih penghargaan pertama tingkat nasional untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain itu juga disampaikan alokasi DAK Fisik TA 2021 sebesar 10 miliar untuk pembangunan gedung perpustakaan.

### **IV. KESIMPULAN**

#### **1. Bidang Pendidikan Dasar Menengah**

- 1) Secara umum pelaksanaan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan sekolah di Kabupaten Gunungkidul cukup bagus, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No.68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan pro aktifnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah.
- 2) Persoalan teknis pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul berhasil diatasi melalui pembelajaran daring menggunakan beberapa metode yaitu *online* menggunakan jaringan internet, *online* menggunakan *WA group* dan *online* menggunakan jaringan HT (*handy talky*). Namun masih ada sebagian siswa tidak mempunyai *handphone* android sendiri, daerah tempat tinggal siswa yang tidak terjangkau jaringan/sinyal seluler, dan sebagian orangtua siswa tidak melek teknologi informasi. Kompetensi SDM dalam memanfaatkan IT cukup tinggi, karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diarahkan pada implementasi dan pengembangan TIK.
- 3) Pelaksanaan program dari Pemerintah Pusat seperti PIP, BOS, DAK, PPDB di Kabupaten Gunungkidul mengalami kendala karena juklak/juknis terlambat terbit dan sering berubah. Kondisi ini menyebabkan penyaluran dana tidak tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu.
- 4) Pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul menemui kendala-kendala sebagai berikut:
  - a. mengalami kekurangan guru, terutama guru ASN di tingkat SD **dan juga guru** mata pelajaran agama.
  - b. masih ditemukan pendistribusi bantuan PIP yang belum tepat sasaran.
  - c. pendidikan inklusi belum dilaksanakan dengan baik, karena tidak adanya organ kedinasan di kabupaten/kota yang menangani masalah pendidikan inklusi secara jelas dan diatur dalam regulasi pemerintah.
  - d. koordinasi antara Kabupaten dan Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, seperti belum adanya mekanisme koordinasi terkait pendataan, kelanjutan sekolah, penyaluran bantuan hibah, hubungan lintas sektor, dll.

- 5) Mengusulkan kepada Kemendikbud, agar meninjau Universitas Gunung Kidul untuk diusulkan menjadi perguruan tinggi negeri.

## 2. Bidang Kebudayaan

- 1) Provinsi DIY telah memiliki Pergub No.3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagai kebijakan turunan dari UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum memiliki kebijakan sebagai dasar implementasi pemajuan kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum menyusun rencana aksi pemajuan kebudayaan selama 5 tahun. Program dan kegiatan kebudayaan disusun berdasarkan analisis data potensi kebudayaan, organisasi kesenian, dan registrasi warisan budaya dan cagar budaya.
- 2) Masalah yang muncul adalah:
  - a. belum ada data lengkap dan valid mengenai obyek pemajuan kebudayaan (OPK);
  - b. kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai OPK;
  - c. kurangnya even besar yang inovatif yang mendukung OPK;
  - d. kurangnya perhatian terhadap kesenian khas Gunung Kidul seperti tari jelantur, musik rinding gumbeng.

## 3. Bidang Pariwisata dan Ekraf

- 1) Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu motor penggerak ekonomi Kabupaten Gunungkidul. Saat pandemi, sektor ini paling awal terdampak. Dinas Pariwisata melakukan riset pada 300 wisatawan sebelum pandemi, rata-rata belanja wisatawan (*spending money*) sebesar 140.000 rupiah per wisatawan per hari. Setelah pandemi turun drastis menjadi 80.000 rupiah per wisatawan per hari.
- 2) Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi untuk menyelenggarakan wisata olahraga (*sport tourism*), mulai dari lari, bersepeda, sepeda motor, mobil, paralayang dan berselancar. Pada tahun 2019 telah berhasil menyelenggarakan even nasional bersepeda *tour de* Gunung Sewu dengan jarak tempuh 104 km.
- 3) Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, beberapa subsektor cukup berkembang di Kabupaten Gunungkidul, yaitu kuliner, fesyen, seni kriya, seni pertunjukan dan film. Perkembangan jumlah usaha wisata dan ekraf cukup pesat, dari 1000 sampai 1600 usaha, namun sebagian besar belum bersertifikasi, baik usahanya maupun SDM-nya.
- 4) Perubahan orientasi pariwisata dari kuantitas menjadi kualitas, membutuhkan perubahan indikator pariwisata. Selama ini indikator pariwisata adalah jumlah wisatawan dan lama tinggal (*long of stay*) wisatawan. Untuk itu Kemenparekraf perlu segera menerbitkan peraturan terkait perubahan tersebut, sehingga daerah dapat segera melakukan penyesuaian.
- 5) Dari PHRI Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan bahwa jalur selatan memiliki banyak titik obyek wisata yang dapat dioptimalkan, namun terkendala akses

jalan. Diharapkan Kemenparekraf berkoordinasi dengan K/L terkait untuk membangun akses ke titik potensi obyek wisata.

#### **4. Bidang Pemuda dan Olahraga**

- 1) Program kegiatan kepemudaan di Kabupaten Gunungkidul terbatas pada kegiatan yang bersifat partisipatif dan berjenjang, seperti seleksi Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia, pertukaran pemuda antar propinsi, Seleksi Paskibaraka. Meskipun anggaran yang bersumber dari Kemendikbud RI minimal, Kabupaten Gunungkidul senantiasa berpartisipasi aktif. Tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul melalui KNPI mendapatkan kegiatan berupa Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda, dan sudah selesai dilaksanakan, dengan melibatkan 26 OKP yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Untuk pembibitan atlet, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 dan 2019 menyelenggarakan kegiatan Galadesa dengan mempertandingkan 6 cabang olahraga yaitu Bola voli, Badminton, Sepak Takraw, Tenis Meja, Atletik dan Sepakbola. Atlet berprestasi hasil Galadesa selanjutnya akan diikutsertakan dalam program pembinaan.

#### **5. Bidang Perpustakaan**

- 1) Pandemi *Covid-19* mempengaruhi kualitas layanan publik perpustakaan untuk melayani kebutuhan masyarakat mengakses buku dan informasi. Namun, layanan e-pusdagunungkidul sangat membantu masyarakat yang tetap ingin mengakses informasi tanpa harus datang ke Perpustakaan Daerah.
- 2) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan berbagai program untuk meningkatkan literasi masyarakat, diantaranya Program Sedekah Buku SAJISAKA (satu jiwa satu pustaka). Program ini bertujuan untuk menggalang partisipasi masyarakat menambah jumlah koleksi pustaka di perpustakaan desa.

### **V. REKOMENDASI**

#### **1. Bidang Pendidikan Dasar Menengah:**

- 1) Kemendikbud RI harus berkoordinasi dengan K/L dan Pemda, khususnya Kabupaten Gunungkidul, untuk memastikan fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan perangkat belajar tersedia.
- 2) Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI bersama Pemda, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, untuk segera menyelesaikan masalah pendidikan yang masih ditemukan di masyarakat seperti kekurangan tenaga guru khususnya guru mata pelajaran agama, distribusi bantuan PIP, BOS dan DAK, layanan pendidikan inklusi serta koordinasi kebijakan dan implementasi pendidikan antara Kabupaten dan Provinsi.
- 3) Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI bersama Kemenkeu RI dan Kemendagri RI untuk merevisi kebijakan terkait mekanisme penyaluran BOS dan DAK agar penggunaannya dalam disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten dan Provinsi.

## 2. Bidang Kebudayaan

Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan pendampingan kepada Pemda, khususnya Kabupaten Gunungkidul yang memiliki kendala dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), mengingat PPKD merupakan langkah mendasar bagi daerah untuk mengupayakan pemajuan kebudayaan.

## 3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Pemda, khususnya Pemkab Gunungkidul, perlu mendukung penuh sektor parekraf yang merupakan sektor paling terdampak pandemi, dengan menjaga ketahanan ekonomi bagi para pelaku parekraf melalui bantuan sosial, promosi dan kegiatan ekonomi kreatif, maupun pembukaan destinasi wisata lokal, dengan tetap memperhatikan protokol *Covid-19*.

## 4. Bidang Pemuda dan Olahraga:

Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI bersama Pemda, untuk tetap menjalankan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dengan tetap memperhatikan *Protokol Covid-19*, termasuk dukungan bagi persiapan pelaksanaan even olahraga nasional dan internasional pada tahun 2021.

## 5. Bidang Perpustakaan:

Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI melakukan pendampingan kepada perpustakaan daerah, untuk memaksimalkan perpustakaan digital dan/atau perpustakaan *online* yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan bacaan untuk masyarakat umum, pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur Pendidikan, serta tetap memperhatikan dan mengembangkan strategi inklusi sosial untuk melayani kebutuhan literasi masyarakat yang paling terdampak *Covid-19*.

## VI. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta, disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 14 Desember 2020

Ketua Tim Wakil Ketua Komisi X DPR RI



Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.

A-444